



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD ZAKRI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 274323

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.080.000.000

1. Tanah Seluas 14314 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 9868 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 17903 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 149.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SPM SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 50.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 60.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 640.294.944**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.979.294.944



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.979.294.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**UNIT KERJA** : DINAS PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YULITRI SUSANTI

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 662513

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 65.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF50 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28LO A/T/ SPM SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 77.600.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 148.390.816

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 890.990.816

**III. HUTANG** Rp. 87.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 803.990.816

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **YELMI FEBRINA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **782561**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **394.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 44.750.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **323.500.000**

1. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, INNOVA REBORN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **----**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **4.910.892**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **723.160.892**

**III. HUTANG** Rp. **695.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **28.160.892**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YENI MARLINA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 873601

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	860.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/186 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	51.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	4.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.100.000.000

**III. HUTANG** Rp. 222.759.419

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 877.240.581

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

